PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Survei pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat)

PEMBIMBING :

Dian Dwinita Kurniawaty, SE., M.Si

OLEH :

Hakiki Annisa

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This research was conducted at the Department of Revenue and Financial Management West Bandung regency. The phenomenon that occurs is not yet government accounting standards on an accrual basis so as to reduce the quality of financial reporting and the quality of personnel is minimal in education levels affect the outcome of local government finance report KBB is still not good. The purpose of this study is to analyze and assess how much influence government accounting standards and the quality of local government officials to the quality of the financial statements at the Department of Revenue and Financial Management West Bandung regency.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to describe the government accounting standard variable, the variable quality of local government officials and the variable quality of financial reporting. To determine the effect of government accounting standards and poor quality of regional government bodies do statistical testing. Statistical test used is to design the structural model, designing a measurement model, construct the path diagram, the test model fit. Suitability test structural models and hypotheses using software SmartPLS 2.0.M3.

The results showed that the effect of government accounting standards with the positive direction of the quality of financial reporting and the quality of local government officials influenced by the positive direction of the quality of financial reporting at the Department of Revenue and Financial Management West Bandung regency.

Keywords: Government Accounting Standards, Quality Regional Government Agencies and quality of financial statements.

I. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang jelas, tepat dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan keuangan khususnya dibidang akuntansi kepemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. (Mardiasmo, 2004)

Saat ini banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang telah mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya dalam praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitas-entitas tersebut memiliki banyak perbedaan khususnya dalam proses pelaporan keuangan dikarenakan belum banyaknya pemerintahan suatu negara yang menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengantur praktik akuntansi bagi organisasi sektor pubik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Daniel Kartika Adhi danYohanes Suhardjo, 2013)

Fenomena yang terjadi adalah kualitas laporan keuangan pemda yang masih rendah disebabkan oleh permasalahan aset yang masih menjadi salah satu fokus perhatian Pemkab Bandung Barat sejak resmi didirikan dari Kabupaten Bandung pada 2007 lalu. Yang menjadi persoalannya hingga saat ini, pihaknya sering mendapati sejumlah catatan mengenai aset dari induk (Kabupaten Bandung) yang masuk ke dalam catatan aset Kabupaten Bandung Barat pada saat pelimpahan, sementara pada kenyataannya sendiri aset tersebut sudah tidak ada. Misalkan dalam catatan di induk ada tanah Disdikpora, tapi sebenarnya dari sejak dulu pun aset itu sudah tidak ada di lapangan , Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus kerja keras menata aset-aset yang merupakan pelimpahan dari Kabupaten Bandung. Aset tersebut mulai dari tanah, bangunan hingga kendaraan. (Maman S Sunjaya, 2016)

Rendahnya kulitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti atau belum oleh Pemda. Temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai.(Beni Ruslandi, 2012)

Rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu akuntansi yang menyebabkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat masih belum optimal karena aparatur belum bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang baik dan benar . (Asep Muhammad Azhar,2016)

Lemahnya pengelolaan aset oleh Pemda, disebabkan oleh beberapa hal. Selain kualitas aparatur yang masih kurang memahami laporan keuangan karena jarang mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) tentang laporan keuangan, poin penting lainnya juga adalah lemahnya administrasi aset. Pengelolaan aset ini masih menjadi masalah besar. Misalnya, banyak aset khususnya berupa tanah yang belum disertifikatkan, begitu juga bangunannya, dan hal itu setiap tahun tetap begitu sehingga banyak Pemda yang belum menyajikan laporan keuangan dengan hasil yang maksimal.(Deni Suardini, 2016)

Hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung barat yang belum optimal disebabkan oleh pelimpahan aset yang kurang lengkap saat pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung Induk lantaran sejumlah dokumen masih berada di Pemkab Bandung meskipun asetnya sudah diserahkan ke Pemkab Bandung Barat. Masalah aset ini memang kerap terjadi ketika ada pemekaran daerah persoalan Dokumen pelimpahan aset memang tak kunjung selesai, lantaran ada aset yang tidak diurus saat pemekaran. Tutur Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum Kabupaten Bandung Barat Maman Sulaiman (2016)

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat.

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui informasi dari penggunaan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah serta mendapatkan bukti empiris bahwa pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun kegunaan penelitian yaitu setiap penelitian pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut.

II. KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Nunuy Nur Afiah (2010 : 21) adalah "Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan".

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010 : 137) adalah:

"Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia".

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas lapooran keuangan pemerintah di Indonesia.

2.1.2 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Adapun pengertian dari kualitas menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah:
"Kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan".

Pengertian aparatur pemerintah menurut Dharma Setyawan Salam (2004 : 169) adalah:

"Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku".

Pengertian aparatur pemerintah daerah menurut Koswara (2001 : 259) adalah

"Seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah".

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah pada unit organisasi pemerintah daerah mulai dari pemerintahan tertinggi di kabupaten/kota hingga tingkat desa/kabupaten.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah

"Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan."

Definisi laporan keuangan menurut Deddi Nordiawan (2012:151) adalah:

"Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas."

Definisi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Tanjung (2012 : 12) adalah:

"Laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan berbagai informasi laporan keuangan."

Sedangkan definisi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa:

"Suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, restribusi atau transaksi lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo, 2013).

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD dibidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah. (Daniel Kartika Adhidan Yohanes Suhardjo, 2013).

2.3 Hipotesis

Menurut Sekaran (2011 : 135) hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara satu atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bisa diuji. Berikut ini adalah hipotesis yang penulis akan uji:

H_1: Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat.

H_2: kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:13), objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:147) adalah sebagai berikut:

"Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Selanjutnya menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verikatif sebagai berikut:

"Memeriksa benar tidaknya apabiladijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalahyang serupa dengan kehidupan".

3.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) adalah sebagai berikut:

"Penentuan *construct* sehingga menjadi *variable* yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel bebas (*Independent*)

Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa:

"Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Variabel *independent* pada penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2).

2) Variabel terikat (*dependent*)

Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa:

"Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

Penelitian ini menggunakan skala ordinal. Pengertian dari skala ordinal menurut Juliansyah Noor (2015:126) adalah:

"Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu".

Dalam operasional variabel ini semua variable diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pertanyan-pertanyaan tipe skala *rating skale*.

Menurut Sugiyono (2013:141), *rating scale* didefinisikan sebagai berikut:

"Skala *rating* adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model *rating scale*, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, *rating scale* ini lebih fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja tetapi bisa juga mengukur persepsi responden terhadap fenomena".

Berdasarkan pengertian diatas, maka skala yang digunakan adalah skala ordinal dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada jawaban. Varibel-variabel tersebut diukur oleh *instrument* pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan *rating scale.*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Reseach).* Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a) Wawancara *(Interview)*

Menurut Umi Narimawati (2010:40) wawancara sebagai berikut:

"Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas".

Adapun wawancara dilakukan terhadap pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

b) Kuesioner

Menurut Umi Narimawati (2010:40) Kuisioner adalah sebagai berikut:

"Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya".

2) Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, *situs web* dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4.1 Populasi dan Sampel

Pengertian populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah sebagai berikut:

"Objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pegawai bagian akuntansi sebanyak 10 Orang, bagian bendahara sebanyak 24 orang dan subag keuangan sebanyak 8 orang, berjumlah 42 orang. Maka populasi dalam penelitian ini adalah 42 Pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:

"sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian".

Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa :

"Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel.Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 30 Pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3.4.2 Metode Analisis

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:41), metode analisis didefinisikan sebagai berikut:

"Proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

1) Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fakta fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.

Menurut Umi Narimawati (2010:245) langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- Setiap indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban dengan menggunakan skala ordinal yang menggambarkan peringkat jawaban.
- Dihitung total skor setiap variabel/subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua responden.
- Dihitung skor setiap variabel/subvariabel = rata-rata dari total skor.
- Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik.
- Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria sebagai berikut:

$$SkorTotal = \frac{SkorAktual}{SkorIdeal} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:245)

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

2) Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat ujistatistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebihdikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software Smart PLS 2.0*.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai berikut:

> "Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi".

Model ini dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana dasar teori pada perancangan model lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksif. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya untuk pengujian proposisi.

Menurut Imam Ghozali (2006:19) *Partial least square* dikemukakan sebagai berikut:

"PLS menggunakan literasi algoritma yang terdiri dari seri analisis *ordinary least squares* maka persoalan identifikasi model tidak menjadi masalah untuk model *recursive*, juga tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu untuk skala ukuran variabel. Lebih jauh lagi jumlah sampel dapat kecil dengan perkiraan kasar".

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji validitas ini dimaksudkan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pertanyaan dalam kuesioner. Suatu pertanyaan dikatakan sahih atau valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut dan

memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,30.

Uji Reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji konsestensi alat ukur penelitian digunakan *Split Half Method (Spearman-Brown Correlation*). Suatu konstruk atau variabel dapat diterima apabila memilki koefisien reliabilitas yang lebih besar dari 0,70.

4.1.2 Hasil Analis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran hasil penelitian mengenaistandar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan, dengan sampel penelitian sebanyak 30 orang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan untuk melihat jawaban atau penilaian responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, maka dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase.

1. **Standar Akuntansi Pemerintahan**
   diketahui bahwa skor aktual untuk variabel standar akuntansi pemerintahan sebesar 948 dan skor ideal sebesar 1350 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 70,22%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 – 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat tergolong baik.

2. **Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah**
   diketahui bahwa skor aktual untuk variabel kualitas aparatur pemerintah daerah sebesar 640 dan skor ideal sebesar 900 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 71,11%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 – 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat tergolong baik.

3. **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
   diketahui bahwa skor aktual untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1187 dan skor ideal sebesar 1800 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 65,94%, termasuk dalam kategori cukup baik berada pada rentang interval 51,01 – 68,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat tergolong cukup baik.

4.1.3 Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara variabel laten eksogenus dengan variabel laten endogen.

1. Korelasi antara standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah daerah adalah sebesar 0,411 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang dikarenakan berada pada interval antara 0,40-0,599. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik standar akuntansi pemerintahan, akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
   Nilai t-statistic yang diperoleh adalah sebesar 4,447 dan lebih besar dari nilai t-kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang sedang dan signifikan antara standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Korelasi antara kualitas aparatur pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,320 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah dikarenakan berada pada interval antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah, akan berdampak semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
   Nilai t-statistic yang diperoleh adalah sebesar 3,869 dan lebih besar dari nilai t-kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah dan signifikan antara kualitas aparatur pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.1.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel laten eksogenus terhadap variabel laten endogenus dapat dilihat bahwa nilai *R Square* yang diperoleh untuk pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,369 atau 36,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah secara bersama (simultan) memberikan kontribusi sebesar 36,9% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 63,1% sisanya merupakan besar pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,447 lebih besar dari t_{tabel} 1,96 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh sebesar 16,90 % terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai korelasi sebesar 0,411 yang berarti standar akuntansi pemerintah daerah memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat. Arah hubungan positif standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang semakin baik akan diikuti dengan kualitas laporan keuangan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh sebesar 16,90% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 83,10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hal ini menjawab fenomena standar akuntansi pemerintah yaitu rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak-lanjuti atau belum oleh Pemda. Temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan Pemda bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai.(Beni Ruslandi, 2015). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu melalui indikator pengungkapan dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 62,67%, yang berarti termasuk dalam kategori cukup baik.

Fenomena selanjutnya mengenai standar akuntansi pemerintahan adalah kualitas laporan keuangan Pemda yang masih rendah disebabkan oleh permasalahan aset yang masih menjadi salah satu fokus perhatian Pemkab Bandung Barat sejak resmi didirikan dari Kabupaten

Bandung pada 2007 lalu. Yang menjadi persoalannya hingga saat ini, pihaknya sering mendapati sejumlah catatan mengenai aset dari induk (Kabupaten Bandung) yang masuk ke dalam catatan aset Kabupaten Bandung Barat pada saat pelimpahan, sementara pada kenyataannya sendiri aset tersebut sudah tidak ada. Misalkan dalam catatan di induk ada tanah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), tapi sebenarnya aset itu sudah tidak ada di lapangan, (Maman S Sunjaya, 2016) kelemahan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena banyaknya pengelolaan aset yang tidak dicatat kedalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu melalui indikator pengakuan dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 64,22%, yang berarti termasuk dalam kategori cukup baik.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 70,22% dan termasuk kategori baik yang artinya standar akuntansi pemerintahan sudah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator pengukuran sebesar 83,78%, selanjutnya indikator pengakuan sebesar 64,22% dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator pengungkapan sebesar 62,67%. Selanjutnya kualitas laporan keuangan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 65,94% dan masuk dalam kategori cukup baik yang artinya kualitas laporan keuangan sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator dapat dipahami sebesar 78,67%, dapat dibandingkan sebesar 68,67%, andal sebesar 62,44%, dan indikator paling rendah adalah relevan sebesar 60,17%.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138) Standar akuntansi pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatan konsisten, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi 2011:271). Dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Serta Implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rukmi Juwita, 2013).

4.2.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,869 lebih besar dari t_{tabel} 1,96 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh sebesar 10,30 % terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai korelasi sebesar 0,320 yang berarti kualitas aparatur pemerintah daerah memberikan pengaruh yang rendah arah positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Barat. Arah hubungan positif kualitas aparatur pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan menunjukan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah yang semakin baik akan diikuti dengan kualitas laporan keuangan baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah memberikan pengaruh sebesar 10,30% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 89,70% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hal ini menjawab Fenomena mengenai kualitas aparatur pemerintah daerah yaitu kurangnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang tidak sesusai dengan disiplin ilmu akuntansi yang menyebabkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat masih belum optimal (Asep Muhammad Azhar,2016). Hal ini sesuai dengan

hasil penelitian yaitu melalui indikator pendidikan dengan persentase 59,56% yang berarti dalam kategori cukup baik.

Sedangkan fenomena lainnya adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah KBB yang belum optimal dikarenakan oleh kurangnya aparatur yang mengikuti BIMTEK oleh sebab itu aparatur pemerintah daerah kurang memahami bagaimana cara menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang baik dan bener hal ini sangat mempengaruhi kinerja aparatur dalam melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah (Deni Suardini, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu melalui indikator pelatihan dengan persentase 82,67% yang berarti dalam kategori baik.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 71,11% dan termasuk kategori baik yang artinya kualitas aparatur pemerintah daerah sudah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator pelatihan sebesar 82,67% dan selanjutnya indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator pendidikan sebesar 59,56%. Selanjutnya kualitas laporan keuangan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 65,94% dan masuk dalam kategori cukup baik yang artinya kualitas laporan keuangan sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator dapat dipahami sebesar 78,67%, dapat dibandingkan sebesar 68,67%, andal sebesar 62,44%, dan indikator paling rendah adalah relevan sebesar 60,17%.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah (mahfud solihin 2015:1) Dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan kualitas aparatur pemerintah daerah atau PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat, artinya semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baik dan benar maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kab.Bandung Barat, artinya semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang akuntansi dan apabila aparatur Pemda sering mengikuti pelatihan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

a) Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik diperlukan sarana dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan menggunakan sistem/aplikasi akuntansi yang memadai.
b) Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dibutuhkan pula aparatur yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang akuntansi agar dapat menyajikan laporan

keuangan dengan baik dan benar. Adapun saran lain yaitu dengan mengikut sertakan aparatur dalam agenda pelatihan akuntansi.

5.2.2 Saran Akademis

a. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan. Bagi peneliti lainnya juga diharapkan agar dapat mengeksplorasi atau mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Kualitas laporan keuangan selain variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini

b. Pengembang Ilmu

Disarankan bisa menambah sumbangan pemikiran dan referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan. Serta dapat memberikan bukti empiris mengenai konsep yang telah dikaji bahwa Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung.2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.

Agus Purwoto. 2007. Panduan Laboratorium Statistik Inferensial. Jakarta: Grasindo.

Agus Erwan., dan Dyah Ratih. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media

Ambar Teguh Sulistiyani, 2011. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media

Arif Ardi Kusumah. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/ OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 3. Desember 2012

Arikunto Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.

Azwar, S. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Barker et al. 2002. Research *Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England

Daniel Kartika Adhi danYohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan SAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang, Vol. 5, No. 3. ISSN : 2252-7826.

Dharma Setyawan Salam. (2004). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.

E, Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Pariba

Erlina, Rasdianto, 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Penerbit Brama Ardian

Herman Sofyandi. Cetakan kedua,2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Graha Ilmu

Imam Ghozali. 2006. Aplikai Analisis *Multivarite* dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Iman mulyana. 2010. Manajemen dan Kehidupan manusia edisi 1 : ISBN1452887659

Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta

Indra Bastian, 2005 Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Irvan Permana. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas. Bandung: UNIKOM

Juliansyah Noor, 2015. Metode Penelitian. Jakarta : Kencana

Mahmudi. 2011. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi

Mashuri. 2008. Metode Penelitian. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.

M. Yusuf John dan Dwi Setiawan S. 2009. Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, et al. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 2 (1).

Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha. 2008. Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008 Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Yogyakarta

Sarundajang, S.H. (2001). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta Penerbit Sinar Pustaka

Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business* Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, (2011), "Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan *partial Least Square Path Modeling*", Penerbit Salemba Infotek, Jakarta.

Subana, M. Dan Sudrajat. (2005). Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung:CV Pustaka Pelajar.

Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009). Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses pada tanggal 4 April 2014 dalam http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media

Umi Narimawati dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Penerbit Genesis.

Undang-Undang

Warisno. 2008. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

http://bandung.bpk.go.id/?p=4439

http://bandungekspres.co.id/2016/raih-wtp-terganjal-aset/

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/02/npb4z8-pemkab-bandung-barat-kembali-raih-wdp